

Tantangan Kepustakawanan Di Era Disrupsi

Dedi Junaedi¹

E-mail: dedi.junaedi1958@yahoo.com

Abstrak

Hubungan pemustaka dengan perpustakaan dan pustakawan mengalami transformasi menjadi suatu ruang publik yang bersifat kompleks. Kompleksitas ruang publik ini tidak hanya untuk menampung interaksi antara pemustaka dan pustakawan dalam hubungannya dengan akses informasi dan pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antar-generasi, antar-kepentingan, antar-komunitas, antar-profesi yang bersatu dan berinteraksi dengan pustakawan, teknologi, jejaring dan direkatkan oleh bahan perpustakaan dan dokumen koleksi perpustakaan. Pustakawan di era disrupsi harus mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dengan melakukan berbagai terobosan. Perpustakaan harus berkreasi dan merespon perubahan yang muncul setelah disrupsi, antara lain dengan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pustakawan harus mampu menunjukkan bahwa dirinya merupakan pilar pendidikan menuju masyarakat berperadaban tinggi melalui diseminasi informasi sehingga masyarakat mampu membedakan informasi mana yang hoax dan yang valid. Masalah penting kepustakawanan Indonesia adalah terjadinya ketidak-merataan jumlah dan kondisi perpustakaan. Saat ini Indonesia hanya mampu menyediakan 20% dari total kebutuhan masyarakat untuk mengakses perpustakaan. Saat ini 4 hal yang harus diperbaiki perpustakaan dalam menciptakan layanan prima di era disrupsi yaitu: Peningkatan akses informasi, perbaikan layanan perpustakaan, memetik manfaat pembelajaran dari pengalaman, perbaikan sumber daya manusia di perpustakaan.

Kata kunci: Kepustakawanan, pustakawan, perpustakaan, pemustaka, era disrupsi.

Abstract

The relationship between user and the library, librarians undergoes a transformation into a complex public space. The complexity of this public space is not only to accommodate the interaction between librarians and librarians in relation to access to information and knowledge, but also as a space for inter-generational, inter-community, inter-community, inter-professional meetings to unite and interact with librarians, technology, networking and glued together by library materials and library collection documents. Librarians in the era of disruption must be able to develop the competencies needed to achieve success by making various breakthroughs. Libraries must be creative and respond to changes that occur after disruption, among others by adapting to changes that occur. Librarians must be able to show that they are the pillars of education towards high civilized society through information dissemination so that people are able to distinguish which information is hoaxed and valid. An important problem of Indonesian librarianship is the unevenness in the number and condition of libraries. At present Indonesia is only able to provide 20% of the total community needs to access the library. At present 4 things that must be improved by the library in creating excellent services in the era of disruption are: Increasing access to information, improving library services, reaping the benefits of learning from experience, improving human resources in the library.

Keyword: librarianship, librarians, library, user, disruption era.

¹ Pustakawan Ahli Utama pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah (i) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) Memajukan kesejahteraan umum; (iii) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia serta mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia khususnya yang berbentuk dokumen karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam lainnya, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Melalui perpustakaan terjadi transformasi pengetahuan dan informasi sehingga dapat terwujud manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter berkebudayaan Indonesia.

Saat ini, perubahan terjadi sangat cepat sehingga menimbulkan ketidakpastian, sebagai contoh, pada tahun 2000 awal kita semua masih ingat mengenai produk telepon genggam yang merajai hampir 70% pasar yaitu NOKIA, namun ketika tahun 2007 muncul produk Android dan Iphone, NOKIA kehilangan seluruh pasarnya hilang ditelan produk baru yang sangat adaptif kepada perubahan perilaku konsumen. Itulah era disrupsi, era dimana sebuah organisasi harus bisa bertransformasi secara cepat menghadapi perilaku konsumennya. Perpustakaan saat ini sedang

menghadapi sebuah era yang penuh dengan ketidak-pastian, kondisi ini mengharuskan perpustakaan harus melakukan *Re-shape* (membentuk ulang) atau *Create* (berinovasi), bisa dibilang perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang luar biasa. Perubahan tersebut telah merubah peradaban secara cepat. Perubahan tersebut bukan hanya dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya saja; namun juga interaksi antara manusia dengan teknologi dan lembaga sosial, termasuk perpustakaan.

Salah satu interaksi yang banyak mengalami perubahan adalah hubungan pemustaka dengan perpustakaan dan pustakawan di dalamnya yang mengalami transformasi menjadi suatu ruang publik yang bersifat kompleks. Kompleksitas ruang publik ini tidak hanya untuk menampung interaksi antara pemustaka dan pustakawan dalam hubungannya dengan akses informasi dan pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antar-generasi, antar-kepentingan, antar-komunitas, antar-profesi yang bersatu dan berinteraksi dengan pustakawan, teknologi, jejaring dan direkatkan oleh bahan perpustakaan dan dokumen koleksi perpustakaan.

Selain itu, perpustakaan juga dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan dan akses terhadap data dan informasi yang serba cepat dan tak pasti. Kondisi ini juga mengarahkan perpustakaan untuk merubah paradigma yang telah ada selama ini, agar mampu merespon kondisi tersebut dengan lebih cepat. Lebih utama lagi adalah bagaimana memformulasikan layanan perpustakaan dan merubah *mindset* para pustakawan agar mampu membangun cara-cara baru, sehingga pelayanan perpustakaan dapat terus berlangsung dan bisa berkembang.

Ketidakpastian ini biasa disebut sebagai era disrupsi merupakan era yang penuh ketidakpastian. Dalam dunia perpustakaan, era disrupsi ditandai adanya perubahan interaksi

antara perpustakaan dengan pemustaka. Perubahan tersebut menimbulkan sejumlah tantangan dan masalah baru yang tidak hanya tumbuh secara linear namun eksponensial, seperti halnya pertumbuhan teknologi baru yang setiap saat bermunculan. Sementara itu, kita perlu melihat apa saja dan bagaimanakah tantangan yang dihadapi pustakawan di era disrupsi? Bagaimana cara pustakawan terus belajar, menggali pengalaman dan melakukan perubahan dalam era disrupsi?

PEMBAHASAN

Era Disrupsi adalah sebuah terminologi bentuk suatu masa, di mana secara radikal terjadi perubahan pola bisnis dan interaksi semua kebutuhan manusia sehingga menjadi lebih nyaman, dan terciptanya sebuah mekanisme baru yang tidak mengenal lagi batas ruang dan waktu (Bekmezci, 2012). Di era sekarang ini, organisasi memiliki berbagai tanggung jawab dan tugas untuk memberikan layanan yang diperlukan dalam menemukan solusi dan jawaban atas pertanyaan terkait persaingan pasar, teknologi, dan manusia. Pada saat yang sama, organisasi harus menemukan cara baru untuk meningkatkan kapasitas perubahannya dan agar mampu memperluas pasar dan memperbaiki kinerja dirinya. Kerjasama strategis dan kesepakatan organisasi serta berbagi pengetahuan dan pengalaman di era disrupsi, merupakan jawaban atas ketidakefektifan yang ditimbulkan oleh bentuk atau pola hubungan selama ini.

Era Disrupsi ditandai dengan periode pertumbuhan ekonomi yang lambat, sumber daya yang langka, persaingan global yang ketat, tingkat pengangguran yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat, ketidakpastian, siklus hidup produk yang singkat, inflasi yang lebih tinggi, dan lain-lain; (Lahiri, 2018). Situasi yang dihadapi organisasi di era disrupsi ini bukanlah tantangan sementara yang harus dilalui sampai waktu yang lebih baik kembali, namun serangkaian tantangan yang terus berlanjut yang memerlukan perubahan struktural dalam bagaimana kita menjalankan

bisnis (Hambrick, 2011). Generasi milenial mulai berperan besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pola pikir dan pola kerja baru, serta perubahan model bisnis. Dampak dari perubahan tersebut adalah munculnya VUCA—sebuah akronim baru singkatan dari *Volatile, Uncertain, Complexity and Ambiguity* (Bennet, 2014). *Volatile* adalah lingkungan bisnis yang labil, berubah cepat, dan terjadi dalam skala besar. *Uncertain* adalah sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi di depan. Sementara itu *Complexity* menggambarkan tantangan yang semakin rumit karena multi faktor yang saling berkaitan. *Ambiguity* adalah ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Dalam situasi VUCA para pemimpin dituntut untuk memiliki kejelasan visi jangka panjang, namun fleksibel dan adaptif dalam jangka pendek. *Value* dan *outcome* menjadi pegangan untuk pembuatan keputusan. Visi jangka panjang tetap dijaga oleh pemimpin dengan pendekatan adaptif dan *agile* (lincah). Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan suatu organisasi di era disrupsi dengan ciri *VUCA* ini.

Era disrupsi memunculkan fenomena ketidakpastian dengan perubahan yang sangat cepat. Salah satu di antaranya adalah perkembangan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi yang tidak linear, melainkan eksponensial dan mengalami proses perubahan yang semakin adaptif terhadap kehidupan manusia (Kasali, 2016). Perkembangan ini membawa perubahan yang sangat cepat dalam organisasi termasuk perpustakaan, saat ini hampir semua perpustakaan mampu memiliki perangkat TIK sendiri dan terus mengembangkannya. Hal ini tentu mempengaruhi setiap orang dalam mengakses informasi yang dibutuhkan melalui perpustakaan. Disrupsi di perpustakaan umum terlihat adanya keengganan masyarakat untuk masuk ke perpustakaan umum jika tidak dilengkapi fasilitas internet atau perangkat TIK yang bagus demikian pula perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi memperlihatkan fenomena

ketergantungan pemustaka kepada e-resources serta layanan berbasis TIK.

Perubahan gaya hidup di era disrupsi saat ini membuat pemustaka cenderung lebih senang membaca informasi yang dapat dengan mudah dibawa atau disimpan dalam ponsel, juga tidak terlalu suka membawa beban berat termasuk buku cetak yang tebal dan berat. Situasi yang berubah dalam tiga dasa warsa terakhir telah merubah berbagai tatanan umum dan kebiasaan baru. Fenomena baru ini sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Untuk itu, perpustakaan perlu melakukan berbagai perubahan yang dapat berkontribusi dalam perubahan yang telah terjadi -- yaitu tidak lagi hanya berorientasi pada *resources* (koleksi) dan tempat (ruang koleksi dan layanan), namun juga sumber daya manusia (pustakawan).

Era disrupsi telah membuat status eksistensi pustakawan dipertanyakan bahkan sempat masuk daftar profesi yang akan hilang di masa yang akan datang. Pustakawan di era disrupsi harus mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dengan melakukan berbagai terobosan. Perpustakaan harus berkreasi dan merespon perubahan yang muncul setelah disrupsi, antara lain dengan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pustakawan harus mampu menunjukkan bahwa dirinya merupakan pilar pendidikan menuju masyarakat berperadaban tinggi melalui diseminasi informasi sehingga masyarakat mampu membedakan informasi mana yang hoax dan yang valid.

Pustakawan dituntut untuk mampu berkolaborasi bukan hanya dengan sesama pustakawan namun juga dengan profesi lain. Kolaborasi merupakan salah satu jalan tengah untuk mengatasi ketidakpastian. Melalui kolaborasi pustakawan bisa melihat dari berbagai sisi perspektif untuk mengetahui bagaimana mengatasi hambatan dan melangkah lebih dekat ke tujuan. Perpustakaan harus mempersiapkan setiap individu di dalam

organisasinya untuk siap menghadapi fenomena era disrupsi dan pasca disrupsi. Sumber Daya Manusia yang “*Super Agile*” (sangat lincah), memiliki 5 ciri berikut:

1. *People Agility*: Mampu bekerjasama dengan siapapun.
2. *Change Agility*: Mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun.
3. *Result Agility*: Mampu tetap berprestasi dan menghasilkan dalam kondisi apapun.
4. *Mental Agility*: Mampu bertahan dalam tekanan mental apapun.
5. *Learning Agility*: Mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat (Widiastuti, 2014).

Cara perpustakaan berinteraksi dengan pemustaka telah berubah sebagai dampak dari globalisasi dan disrupsi. Logika persaingan pustakawan dengan teknologi mesin pencari “Google” telah menjadi fenomena baru yang menantang profesi pustakawan. Pustakawan mungkin tetap dibutuhkan dan tak tergantikan, tetapi dia harus berubah, terus bergerak dan bertindak cepat, dan memiliki kesempatan untuk menawarkan sebuah pelayanan yang humanistik.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara itu Pasal 5 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa:

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

- (3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas pada pasal 7, ayat 1, butir c, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Sementara itu pasal 12 ayat 2 butir q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan pada semua level pemerintahan dari tingkat pusat sampai desa.

Pada tahun 2016, Perpustakaan Nasional merilis mengenai data ketersediaan dan kebutuhan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga pemerintah/swasta, pendidikan dasar, menengah dan tinggi (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Perpustakaan Sesuai dengan Wilayah, Lembaga dan Satuan Pendidikan

N0	JENIS PERPUSTAKAAN	JMLH KETERSEDIAAN	JMLH KEBUTUHAN	TINGKAT KETERSEDIAN %
1	Perpustakaan Nasional	1	1	100
2	Perpustakaan Umum	23.611	91.192	26
	Perpustakaan Umum Provinsi	33	34	97
	Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	467	515	91
	Perpustakaan Umum Kecamatan	600	7.094	8
	Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	21.467	82.505	26
	Perpustakaan Komunitas	693	693	100
	Taman Bacaan	351	351	100
3	Perpustakaan Khusus	7.132	384.633	2
4	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	121.187	287.631	42
	SD/MI	100.000	174.179	57
	SMP/MTs	12.000	56.620	21
	SMA/SMK/MA	6.599	35.581	19
	Pondok Pesantren	2.588	21.251	12
5	Perpustakaan Pendidikan Tinggi	2.428	4.496	54
JUMLAH		154.359	767.953	20

Sumber: Pusat pengembangan Perpustakaan dan Kajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, 2016

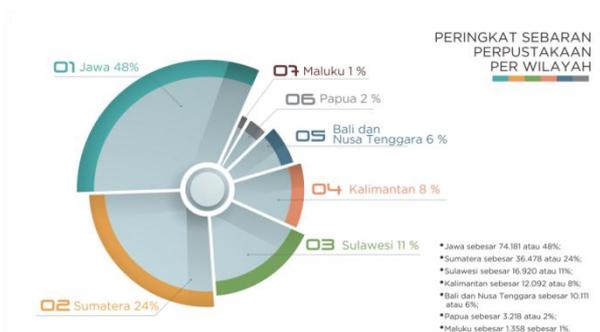
Data Tabel menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan perpustakaan dibandingkan jumlah kebutuhan perpustakaan masih sangat tinggi, terutama ketersediaan perpustakaan khusus (baru tersedia 2%), perpustakaan umum kecamatan (baru tersedia 8%), dan perpustakaan pondok pesantren (hanya terdapat 12%). Secara umum keberadaan semua jenis perpustakaan di Indonesia baru mencapai 20% dari kebutuhan yang harus ada. Tabel 1 menunjukkan keberadaan lima jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, yang secara peringkat ketercukupan adalah sebagai berikut: (1) perpustakaan nasional 100%; (2) pendidikan tinggi 54%; (3)

perpustakaan sekolah 42%; (4) perpustakaan umum 26%; dan (5) perpustakaan khusus 2%.

Dari jumlah total 82.505 desa/kelurahan di Indonesia hanya 30% atau 22.473 desa yang memiliki perpustakaan, mayoritas desa tidak memiliki akses perpustakaan sebagai sumber belajar dan menambah pengetahuan. Data sebaran perpustakaan berbasis kewilayahan menunjukkan bahwa wilayah barat Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera menempati posisi tertinggi sebaran perpustakaan. Sementara itu, semakin ke wilayah timur Indonesia sebaran perpustakaan semakin kecil. Data ini menjelaskan bahwa fokus pembinaan dan pengembangan perpustakaan di masa mendatang perlu dilakukan perubahan orientasi yaitu dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan terutama pada kawasan timur Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

sumber daya manusia; (vi) gedung atau ruangan; (vii) anggaran; dan (viii) manajemen perpustakaan. Dari jumlah perpustakaan sebanyak 154.359 perpustakaan yang tersebar di 34 provinsi baru 0,3% terakreditasi atau sesuai dengan standarisasi nasional dan 99,7% perpustakaan belum terakreditasi.

Dari segi jumlah tenaga perpustakaan saat ini Indonesia sangat kekurangan secara kuantitas dan kualitas. Kualitas tenaga perpustakaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pemustaka. Kualitas tenaga perpustakaan dilihat dari kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta melalui evaluasi kualitas tenaga perpustakaan melalui uji kompetensi dan asesmen sertifikasi. Sebaran jumlah tenaga perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.



Grafik 1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 9 ayat 1 s.d. 3 menyatakan bahwa setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Untuk itu, ketentuan dalam SNP juga menjadi indikator dalam penilaian akreditasi perpustakaan. Komponen penilaian akreditasi penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan terdiri atas; (i) layanan; (ii) kerjasama; (iii) koleksi; (iv) pengorganisasian bahan perpustakaan; (v)

Tabel 2. Sebaran Tenaga Perpustakaan Berdasarkan Jenis Perpustakaan Per-Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan					Jumlah
		PS	PPT	PK	PN	PU	
1	Aceh	0	52	1	0	27	80
2	Sumatera Utara	2	47	4	0	48	101
3	Riau	7	29	3	0	41	80
4	Kepulauan Riau	0	0	0	0	3	3
5	Bengkulu	0	27	1	0	13	41
6	Sumatera Barat	5	89	5	0	14	113
7	Jambi	5	18	7	0	30	60
8	Sumatera Selatan	11	21	7	0	35	74
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	14	14
10	Lampung	37	25	1	0	12	75
11	Banten	2	36	10	0	9	57
12	DKI Jakarta	0	94	203	253	21	571
13	Jawa Barat	3	97	88	0	49	237
14	Jawa Tengah	19	168	11	0	86	284
15	DI.Yogyakarta	3	139	15	0	44	201
16	Jawa Timur	2	158	10	0	68	238
17	Kalimantan Barat	1	21	2	0	8	32
18	Kalimantan Tengah	0	12	0	0	27	39
19	Kalimantan Selatan	1	30	29	0	26	86
20	Kalimantan Timur	0	24	0	0	17	41
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	67	0	0	26	93
23	Gorontalo	0	12	1	0	0	13
24	Sulawesi Tengah	0	34	1	0	24	59
25	Sulawesi Tenggara	0	25	1	0	19	45
26	Sulawesi Barat	0	1	0	0	0	1
27	Sulawesi Selatan	17	99	28	0	81	225
28	Bali	13	67	19	0	37	136
29	Nusa Tenggara Barat	5	40	11	0	30	86
30	Nusa Tenggara Timur	0	18	6	0	16	40
31	Maluku	0	10	0	0	13	23
32	Maluku Utara	0	2	0	0	0	2
33	Papua	0	11	1	0	17	29
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
Jumlah		133	1,473	465	253	855	3,179

Ket:

PS: Perpustakaan Sekolah;

PPT: Perpustakaan Perguruan Tinggi;

PK: Perpustakaan Khusus;

PN: Perpustakaan Nasional;

PS: Perpustakaan Sekolah;

PU: Perpustakaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, selain memenuhi angka kredit yang ditentukan, saat ini kenaikan jenjang jabatan fungsional pustakawan disyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan. Sebagai tindak lanjut UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak bulan Juli 2014 sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jabatan adalah dengan melakukan uji kompetensi tertulis secara serentak di setiap provinsi. Materi uji yang akan diujikan berasal dari butir kegiatan sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 9 tahun 2014 yang telah ditetapkan pada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Jabatan Fungsional Pustakawan, materi tersebut disusun dan diujikan berdasarkan jenjang jabatan fungsional pustakawan yang akan ditempuh.

Berikut ini data pustakawan yang telah mengikuti uji kompetensi.

Tabel 3. Sebaran Uji Kompetensi Pustakawan per-Provinsi

No	Provinsi	Keterangan		Jumlah Peserta	Jumlah Perprovinsi
		Lulus	Belum Lulus		
1	Aceh	0	0	0	80
2	Sumatera Utara	6	0	6	101
3	Riau	6	0	6	80
4	Kepulauan Riau	0	0	0	3
5	Bengkulu	1	0	1	41
6	Sumatera Barat	0	0	0	113
7	Jambi	0	0	0	60
8	Sumatera Selatan	9	3	12	74
9	Bangka Belitung	0	0	0	14
10	Lampung	0	0	0	75
11	Banten	4	0	4	57
12	DKI Jakarta	3	0	3	571
13	Jawa Barat	8	0	8	237
14	Jawa Tengah	2	0	2	284
15	DI. Yogyakarta	36	6	42	201
16	Jawa Timur	40	3	43	238
17	Kalimantan Barat	0	0	0	32
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	39
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	86
20	Kalimantan Timur	0	0	0	41
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	93
23	Gorontalo	0	0	0	13
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	59
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	45
26	Sulawesi Barat	0	0	0	1
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	225
28	Bali	13	3	16	136
29	Nusa Tenggara Barat	35	1	36	86
30	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	40
31	Maluku	0	0	0	23
32	Maluku Utara	0	0	0	2
33	Papua	0	0	0	29
34	Papua Barat	0	0	0	0
Jumlah		163	16	179	3,179

Sumber: Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpusnas, 2016.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, jumlah pustakawan di Indonesia tahun 2016 adalah 3.179 orang. Dari jumlah tersebut, yang mendaftar atau mengikuti uji kompetensi hanya sebesar 5.63% atau 179 pustakawan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 pustakawan (5.13%) dinyatakan lulus uji kompetensi, sehingga dapat naik ke jenjang jabatan berikutnya. Dengan demikian jumlah dan daerah yang melakukan uji kompetensi pustakawan masih sangat jauh dari ideal. Hal ini tentu saja memerlukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di antaranya melibatkan Balai Diklat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejatinnya perpustakaan memegang peran penting dalam mencerdaskan bangsa di era disrupsi, perpustakaan diharapkan lebih “berani” melakukan terobosan untuk membantu masyarakat meingkatkan literasinya melalui program-program yang sinergis dan kekinian dan sesuai dengan zaman sehingga perpustakaan mampu memberikan solusi dan jawaban terhadap proses pembelajaran dalam mencerdaskan bangsa.

Masalah dan Tantangan Kepustakawanan Indonesia di Era disrupsi

Masalah penting dalam kepustakawanan Indonesia adalah terjadinya ketidak-merataan jumlah dan kondisi perpustakaan. Saat ini Indonesia hanya mampu menyediakan 20% dari total kebutuhan masyarakat untuk mengakses perpustakaan. Tingginya *gap* tersebut terjadi hampir di semua jenis perpustakaan dengan berbagai penyebab mulai dari sebaran perpustakaan yang tidak merata, sampai dengan akses terhadap perpustakaan yang tidak merata. Permasalahan lain adalah rendahnya jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan di Indonesia, sementara konten digital muncul di berbagai media sosial dan ilmiah melalui Internet bisa berada lebih dekat dengan masyarakat karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan infrastruktur internet yang saat ini telah mencapai 54.68% dari populasi 256 Juta

jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018).

Selain infrastruktur Internet, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan jumlah pustakawan. Berdasarkan data Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan RI, saat ini jumlah pustakawan di Indonesia adalah 3.176 orang dan jika di rasio dengan jumlah penduduk terjadi ketimpangan yang sangat besar dimana 1 Pustakawan harus bekerja di 200 lebih perpustakaan dan dari 3.176 pustakawan hanya sebanyak 646 pustakawan yang telah memenuhi standar kriteria sertifikasi sebagai pustakawan, jumlah ini sangat kecil karena jika dirasio dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 256 juta jiwa, maka satu orang pustakawan di Indonesia harus bekerja di 200 perpustakaan untuk bisa melayani sesuai standar nasional perpustakaan dimana 1 orang pustakawan untuk 1 perpustakaan.

Sementara itu, jumlah lulusan perguruan tinggi pencetak pustakawan yang bisa dihadirkan dari 33 kampus yang memiliki program studi ilmu perpustakaan, tidak semua lulusannya bisa terserap ke dalam dunia kepustakawanan, khususnya perpustakaan yang dikelola pemerintah karena kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Untuk itu, saat ini dibutuhkan suatu terobosan dalam menciptakan SDM perpustakaan yang bermutu melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan era disrupsi. Saat ini diklat kepustakawanan hanya didominasi oleh instansi pemerintah yaitu Perpustakaan Nasional dan pemerintah daerah. Perpustakaan Nasional menyelenggarakan sejumlah diklat, namun belum sepenuhnya mengadopsi kurikulum sesuai dengan perkembangan saat ini. Kurikulum yang bertujuan membentuk pustakawan yang tangkas secara pemikiran, maupun tangkas dalam bekerja di era disrupsi menjadi semakin penting. Persoalan ini memerlukan adanya sinergi untuk meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan

antar pemerintah, universitas dan lembaga swasta serta organisasi profesi di Indonesia.

Adanya pemahaman dan sekaligus komunikasi dua arah bisa menjadikan pemustaka ingin mengulang kembali kehadirannya di perpustakaan. Pemustaka saat ini tidak sekedar membutuhkan koleksi sumber informasi atau layanan saja, tetapi juga pengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Salah satu unsur keberhasilan layanan sebuah perpustakaan adalah layanan yang memberikan pengalaman yang membekas di hati para pemustaka.

Setidaknya ada 4 hal yang harus diperbaiki perpustakaan dalam menciptakan layanan prima di era disrupsi, ialah:

- a. Peningkatan akses informasi: Perpustakaan perlu memanfaatkan teknologi pengelolaan dan layanan informasi terkini. Automasi tidak sekedar menyediakan perangkat lunak (*software*) untuk menyimpan metadata, melainkan juga harus dikembangkan sehingga menjadi layanan yang memudahkan dan efisien.
- b. Perbaikan layanan perpustakaan: Perpustakaan perlu menyediakan ruang belajar kontekstual yang terbagi menjadi ruang sosial, ruang senyap, dan ruang sepi atau kontemplasi. Ruangan perpustakaan harus mampu mengakomodasi pembelajaran mandiri dan berkelompok, ruang untuk menggali kreatifitas dan inovasi, sekaligus ruang untuk mengimplementasikan konsep *co-working space* (ruang kerja bersama) secara nyata dan inklusif.
- c. Memetik manfaat pembelajaran dari pengalaman (*lesson learned*): Tantangan perpustakaan adalah secara aktif terlibat dalam isu-isu yang ada di masyarakat untuk disebarluaskan sebagai implementasi *knowledge mobilization*. Sumber informasi perpustakaan harus semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan.
- d. Perbaikan sumber daya manusia di perpustakaan: ini adalah hal esensi dalam penciptaan layanan prima, untuk itu peningkatan SDM yang berkelanjutan

melalui pelatihan, workshop, seminar yang mampu meningkatkan rasa asah (*Intelligence Quotion*), rasa asih (*Spiritual Quotion*), rasa asuh (*Emotional Quotion*) dan profesionalisme pustakawan.

Sungguh diperlukan adanya perubahan metode dan gaya kepemimpinan di perpustakaan. Pustakawan harus memegang peranan sebagai pemimpin, dan ditantang untuk bisa melakukan perubahan. Setidaknya ada dua tantangan yg menanti pustakawan. Tantangan pertama, mereka harus memahami lingkungan baru ini dan menentukan bagaimana cara memindahkan organisasi ke arah yang benar meski situasi dan kondisi tidak jelas. Tantangan kedua, pustakawan harus memiliki harapan untuk sukses dalam menghadapi perubahan, para pustakawan harus secara jelas mengartikulasikan kepentingan peran mereka. Setelah terjadi sinergi antar pustakawan perlu adanya saling pemahaman bahwa mereka berada di garis terdepan dalam layanan informasi dan pengetahuan secara kredibel dan berintegritas. Sejalan dengan hal tersebut, perpustakaan harus dapat memaksimalkan peran dan fungsinya di era disrupsi, perpustakaan harus melakukan hal sebagai berikut sebagai solusi dan harapan kepada masyarakat antara lain:

Pertama, layanan perpustakaan harus bertransformasi dengan basis inklusi sosial, sehingga perpustakaan dapat berfungsi sebagai tempat pembelajaran seumur hidup (*life-long learning*) masyarakat. Perpustakaan tempat di mana semua lapisan masyarakat dari balita sampai lanjut usia bisa terus belajar tanpa adanya pembatas dan ruang-ruang kelas. Di perpustakaan, semua orang secara inklusif dapat terlibat dalam berbagai kegiatan bersama, diajak untuk membuka wawasannya, mampu berpikir kritis, berkreasi, membangun inovasi, mampu mencermati berbagai masalah bersama dan kemudian bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya mendapatkan solusi terbaik.

Kedua, perpustakaan harus dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan budaya. Perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat strategis untuk mempromosikan keberagaman, kerukunan, persatuan dan memupuk perilaku produktif. Individu-individu yang terdidik dan berpengetahuan luas akan membentuk komunitas yang solid dan berpengetahuan. Perubahan pada tingkat individu akan membawa perubahan pada tingkat masyarakat. Komunitas yang berbudaya adalah komunitas yang berpengetahuan dan produktif. Komunitas yang produktif mampu melakukan perubahan dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Ketiga, perpustakaan harus dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Idealnya, perpustakaan adalah ruang di mana segala lapisan masyarakat, pola-pola pemikiran dan artikulasi kepentingan bisa bertemu dan berdialog tanpa dibatasi prasangka agama, ras, aliran, kepangkatan, strata, kesukuan, golongan, daerah asal dan lain-lain. Perpustakaan bisa menjadi sangat strategis sebagai ruang bersama berbagai komunitas untuk berkumpul dan mendiskusikan beragam masalah sosial dan ekonomi sehari-hari. Perpustakaan juga tidak lagi sekedar sebagai tempat yang menyediakan ruang baca, tetapi juga ruang belajar secara kontekstual, ruang mengasah keterampilan dan ruang diskusi publik bagi komunitas sekitarnya. Pustakawan harus terus menghidupkan perpustakaan sebagai media aktifitas kemasyarakatan secara dinamis, tetapi mampu mendokumentasikan semua pengetahuan publik yang dihasilkan dan menyebarkan lagi ke anggota komunitas lainnya. Seorang pustakawan dituntut tidak hanya mampu mengolah informasi, tetapi juga harus punya kepekaan sosial yang tinggi, serta keahlian berkomunikasi yang handal.

Keempat, perpustakaan harus dapat membangun ekosistem pengetahuan dan literasi masyarakat. Perpustakaan berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan informasi antara masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, lembaga riset, penerbit, usaha rekaman, museum, pengarsipan dan media masa. Perpustakaan bisa menjadi agregat dari seluruh komponen tersebut dalam kapasitasnya sebagai repositori pengetahuan dan warisan dokumenter bangsa. Komponen-komponen dari ekosistem pengetahuan dan literasi tersebut, saling menghidupi secara lateral. Representasi khazanah intelektual bangsa yang memiliki signifikansi dan bernilai ke-Indonesia-an dalam berbagai format harus dihimpun, dirawat, diorganisasikan dan disediakan kepada masyarakat luas, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan nasional.

Kelima, perpustakaan harus mampu melakukan mobilisasi pengetahuan melalui berbagai cara termasuk kemas ulang informasi. Mobilisasi pengetahuan dapat memberikan masukan-masukan berharga kepada para pengambil keputusan, sebagai masukan dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan punya posisi tawar yang lebih baik dalam memberikan masukan-masukan dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi di atas secara maksimal, perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri tetapi perlu sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum, swasta maupun pemerintah, dan antar perpustakaan itu sendiri.

Penutup

Dunia saat ini menghadapi era yang penuh ketidak pastian dan mudah berubah. Kehidupan manusia pun telah banyak berubah. Perubahan kehidupan manusia bukan hanya datang dari bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama namun juga bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi dan juga dengan organisasi. Salah satu interaksi yang banyak berubah adalah antara pustakawan dengan pemustaka. Perpustakaan adalah dunia yang sangat dinamis, Perpustakaan akan terus tumbuh dan mengantisipasi berbagai perubahan baru yang akan terjadi di waktu yang akan datang dan tentu perpustakaan bukan hanya sekedar tempat penyimpanan pengetahuan saja melainkan menjadi rujukan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. ***Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke depan dapat menjadi 10 Besar Perpustakaan Terbaik Dunia dari segi koleksi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia.*** Pengembangan sumber daya Manusia adalah kunci untuk menciptakan suatu negara yang baik, saya teringat ketika Jepang luluh lantak oleh bom nuklir sekutu, sang kaisar berkata "Berapa Jumlah Guru Yang Masih Tersisa?" dan dalam 30 Tahun Jepang bangkit dan menjadi negara yang paling maju di dunia. Sebagai pustakawan kita harus selalu mengingat kalimat ini ***"Berbanggalah Menjadi Pustakawan, Karena Ia merupakan sinar di kegelapan. Untuk itu Pustakawan Harus Bangkit dalam rangka mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, Pustakawan Maju, Masyarakat Berjaya"***.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2017). Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/survei2017/download/9VXexDQYi0pZvGNE13djTyzMhalWRA>.
- Bennet, Nathan., Lemoine, James G.(2014). What VUCA Really Means for You. *Harvard Bus.*
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. (2006) . Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bekmezci, M. (2012). The Elements That Determine The Success Of The Strategic Allies In, 58, 1618–1627. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1149>.
- Bennet, Nathan., Lemoine, James G.(2014). What VUCA Really Means for You. *Harvard Bus Review*, January-February.
- Central Connecticut State University/CCSU. (2016). World's Most Literate Nations 2016. <http://www.ccsu.edu/wmln/> [Accessed, September 12th 2017]
- Curous, George. 2014). 8 Characteristics of the “Innovator’s Mindset. Dalam *Principles of change: The stories of learning and leading*. Diakses 5 April 2018 dari <https://georgecouros.ca/blog/archives/4783>
- Dweck, C. S., (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*, New York, NY: Random House
- Gartner. (2015). Top 10 Strategic Technology Trend For 2015. <http://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-strategic-technology-trends-for-2015/> [Accessed, September 1st 2017]
- Gupta, A.K. and Govindarajan, V., (2002). Cultivating a Global Mindset, *Academy of Management Executive*, Vol. 16, No. 1, pp. 116-126
- Hambrick, D. C., (2007) Upper echelons theory: An update, *Academy of Management Review*, Vol. 32, No. 2, pp. 334–343
- Kandampully, J., (2002). Innovation as the core competency of a service organisation: the role of technology, knowledge and networks, *European Journal of Innovation Management*, Vol. 5, No. 1, pp. 18-26
- Kasali, R. (2016). *Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*. Jakarta. Rumah Perubahan.
- Kompas. (2015). <http://print.kompas.com/baca/ekonomi/makro/2015/04/13/Gawai-Jadi-Kebutuhan-Primer> . [Accessed, September 1th 2017]
- Lahiri, S., Pe’rez-Nordtvedt, L. and Renn, R.W. , (2008). Will the new competitive landscape cause your firm’s decline? It depends on your mindset, *Business Horizons*, Vol. 51, pp. 311–320
- Lee, C., Lee, K. and Pennings, J.M., (2001). Internal Capabilities, External Networks, and Performance: a study on technology based ventures, *Strategic Management Journal*, Vol. 22, pp. 615-640
- Mobo Market. 2015. *MoboMarket : Inilah Kebiasaan Pengguna Android Indonesia Tahun 2014*. <http://www.gadgetgaul.com/mobomarket-inilah-kebiasaan-pengguna-android-indonesia-tahun-2014.html> [Accessed, September 12th 2017]
- Narendra, Alberto. (2014). *Layanan Perpustakaan Prima Di Era Generasi*

Digital (Digital Native) : Inspirasi, Transformasi Dan Inovasi. Junal FPPTI 13(15), 81-92.

Nasution, R. A. 2012. *Excellence in practice in interactive knowledge sharing system.* Diakses pada 5 April 2018 dari <http://www.sbm.itb.ac.id/id/menciptakan-innovation-mindset>

Priyanto, Ida Fajar. 2018. *Menghadapi era normal baru.* Diakses 4 April 2018 dari <https://kompas.id/baca/opini/2018/02/03/menghadapi-era-normal-baru/> .

Skaggs, P., Fry, R. and Wright, G., (2012) *Creating a Mindset for Innovation, Journal of Strategic Innovation and Sustainability, Vol. 7, No. 3, pp. 95-99*

Widhiastuti, Tri. 2014. *Inovation Mindset: Menjelmakan Ide Menjadi Kontribusi Nyata dalam Bisnis di Era Normal Baru.* <http://www.lpp.ac.id/2017/10/inovation-mindset-menjelmakan-ide-menjadi-kontribusi-nyata-dalam-bisnis-di-era-normal-baru/> [Accessed, March 12th 2018]

World Economic Forum. (2016). *World Competitiveness Index 2015-2016.* <https://goo.gl/DIrGnQ/> [Accessed, January 17th 2017]

World Economic Forum. 2016. *Networked Readiness Index 2015.* <http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/network-readiness-index/> [Accessed, July 10th 2017]

Yang, J., (2012). *Innovation capability and corporate growth: An empirical investigation in China, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 29, pp. 34-46*

DAFTAR SUMBER LAINNYA

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (1990). *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Wajib Simpan Karya Cetak Karya Rekam.* Jakarta (ID): Perpunas RI.

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (2007). *Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.* Jakarta (ID) : Perpunas RI.

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (2009). *Grand Desain Pembangunan Perpustakaan digital nasional.* Jakarta (ID): Perpunas RI.

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (2014). *Monitoring Perpustakaan Digital Nasional.* Jakarta (ID) : Perpunas RI.

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perpustakaan Nasional RI.* Jakarta (ID) : Perpunas RI.

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (2015). *Laporan Pengembangan Perpustakaan Digital Nasional Indonesia (e-Library) Tahun 2015-2019.* Jakarta (ID) : Perpunas RI.

[Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. (2015). *Survey Minat Baca di Indonesia.* Jakarta (ID) : Perpunas RI.